

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nahdlatul Ulama merupakan wadah untuk memperluas peran dan kiprah ulama-ulama kalangan Islam tradisional dari lingkup keagamaan menuju bidang yang lebih luas dalam kemasyarakatan seperti, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya.¹ Pada masa awal perintisan, NU menggalang dukungan dari ulama-ulama lokal lewat perintisan cabang-cabang NU di berbagai daerah, khususnya di Jawa dan Madura. Dukungan para ulama lokal diperlukan bagi NU untuk menarik simpati kalangan Muslim di perdesaan sehingga organisasi NU dapat berkembang secara mengakar dalam masyarakat.

NU bergabung bersama organisasi keagamaan lain dalam Partai Masyumi sejak masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan.² Kemudian NU memutuskan keluar dan membentuk partai yang independen pada tahun 1952.³ Tidak lama setelah menjadi partai, NU langsung dihadapkan pada persaingan

¹Islam tradisional adalah kalangan muslim yang memandang bahwa masa lalu adalah segala-galanya sehingga berusaha mengapresiasi tanpa melihat tantangan zaman yang telah berubah. Kalangan ini bersetia kepada pandangan empat Madzhab Fikih, yakni Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafii. Pandangan keagamaan ini disebarluaskan kepada masyarakat lewat institusi pesantren yang didirikan oleh para kiai. Abdul Chalik, *Islam, Negara, dan Masa Depan Ideologi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 202017), hlm. 235.

²Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 206.

³Pionir yang digadang-gadang telah membawa-serta NU dalam kancah politik praktis adalah mendiang K.H. Wahab Chasbullah. Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU", dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 19-20.

politik menjelang Pemilu tahun 1955, yang merupakan Pemilu Pertama sejak Indonesia merdeka.

NU muncul sebagai partai politik berbasis massa yang berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari mayoritas masyarakat di pedesaan pada pemilihan umum tahun 1955.⁴ Pada pemilihan umum tersebut, NU menduduki posisi ketiga perolehan suara terbanyak di tingkat nasional, di bawah Masyumi dan PNI. Dukungan kepada NU secara mayoritas datang dari kalangan masyarakat santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sepak terjang politik NU di tingkat lokal pedesaan Jawa hanya disaingi oleh PKI yang mendapat dukungan dari kalangan abangan.⁵

Persaingan antar partai politik untuk menarik simpati dari masyarakat terus berlanjut setelah Pemilu tahun 1955 tersebut. Masing-masing partai memiliki basis massa dengan latar belakang kultural yang khas. Partai Nahdlatul Ulama menjadi representasi politik dari kalangan santri tradisional. Pesaing utama NU, Partai Komunis Indonesia menjadi pilihan politik bagi kalangan petani kecil dan buruh.⁶ Sedangkan PNI menjadi pilihan politik bagi kalangan nasionalis dan priyayi. Partai-partai politik terus berusaha mencari dukungan dari masyarakat dengan menggarap bidang-bidang seperti, kepemudaan, kesenian,

⁴ Laten politis muncul sejak NU masih berbentuk *jamiyah diniyah* (organisasi sosial keagamaan). Potensi politis ini kemudian dilabuhkan pada bentuk kegiatan politik praktis, sebelum NU kembali ke Khittah 1926 tahun 1984. A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 11.

⁵ Clifford Geertz, *op. cit.*, hlm. 542.

⁶ Rendy Rkyatama, *Pertarungan Kampanye PKI, Nahdlatul Ulama, dan Masyumi Menjelang Pemilu Tahun 1955 di Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2014), hlm. 29.

keperempuanan, pertanian, pendidikan, dan budaya. Kegiatan politik yang masif ini menyebabkan terjadinya polarisasi dalam masyarakat. Pada rentang waktu antara tahun 1955-1965 terjadi politisasi di segenap aspek kemasyarakatan sebagai dampak dari aktifitas politik yang masif.

Polarisasi antar partai politik beserta basis massanya menurun drastis akibat peristiwa G30S di Jakarta. Peristiwa di tataran elit nasional tersebut memantik gejolak konflik di daerah-daerah sebagai akibat polarisasi politik yang terjadi di masyarakat. Pada momentum tersebut, NU turut memainkan peran dalam proses pergantian kekuasaan.⁷ Peran NU di tingkat nasional dilakukan melalui jalur konstitusional dengan memberi legitimasi pada kekuasaan Soeharto. Sedangkan peran NU di daerah ditunjukkan melalui sokongan badan otonom NU kepada militer yang sedang melakukan ‘pembersihan’ kaum komunis di tahun 1966-1967.

Kalangan militer muncul sebagai aktor utama yang menguasai perpolitikan di Indonesia pasca peristiwa G30S. Pasca peristiwa tersebut seluruh kekuatan politik sipil berusaha untuk dilemahkan, diantaranya dengan dilarangnya PKI melalui TAP MPRS No XXXIII/1967 yang berakibat pada banyak kader dan simpatisannya masuk ke dalam tahanan atau meregang nyawa dalam proses ‘pembersihan’. Kekuatan PNI tidak luput dilucuti secara perlahan karena partai ini menjadi pendukung utama Presiden Soekarno. Kondisi ini membuat NU menjadi satu-satunya kekuatan politik sipil yang masih layak diperhitungkan, setidaknya untuk menghadapi Pemilihan Umum pasca pemerintahan Soekarno.

⁷ Andree Feillard, “Islam Tradisional dan tentara dalam Era Orde Baru”, dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed), *op.cit.* hlm 35.

NU mulai menyesuaikan diri dengan keadaan perpolitikan pasca tragedi G30S. Sebagai partai politik, NU berusaha menyiapkan diri dalam menyongsong Pemilu yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1968, yang kemudian urung dilaksanakan karena adanya penundaan dari pemerintah. Melalui perdebatan yang cukup alot dalam DPR-GR akhirnya pemilu ditetapkan pelaksanaannya pada tahun 1971. Pemilihan umum tahun 1971 mempertemukan kekuatan partai-partai politik ditambah dengan Golongan Karya, yang merupakan representasi politik dari pemerintah.

Pada momentum menjelang Pemilihan Umum tahun 1971 terjadi intimidasi terhadap pendukung NU di daerah-daerah yang dilakukan oleh oknum Golongan Karya seperti Babinsa dan Pemuda Golkar.⁸ Intimidasi di tingkat daerah juga terjadi pada simpatisan PNI dan kontestan pemilu lainnya. Hal ini mempengaruhi kekuatan partai politik dalam menyiapkan dan menyongsong pemilu tersebut. Imbauan dari Menteri Dalam Negeri kepada semua pegawai-pegawai kedinasan dan departemen untuk mendukung Golongan Karya, turut serta memberi andil dalam pelemahan kekuatan partai-partai politik.⁹ NU tidak luput terkena dampak dari kebijakan ini yang menyebabkan banyak kader potensial NU harus memberikan dukungannya kepada Golongan Karya.

⁸ Ada dua sikap di dalam internal NU dalam menanggapi tekanan dan intimidasi dari pemerintah, yaitu mereka yang bersikap lunak dan mereka yang berusaha membawa NU menjadi oposan bagi pemerintah. Dua sikap ini masing-masing diwakili oleh perseteruan antara Idham Chalid dan Subchan Z.E. *Ibid.* hlm. 54-55.

⁹ R. William Liddle, *Indonesia 1977: The New Order's Second Parliamentary Election* (Yogyakarta: Redaksi Kelompok Studi Batas Kota, 1978), hlm. 10 dalam Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 54.

Golongan Karya sukses menjadi pemenang pada Pemilu tahun 1971 dengan perolehan 62,8% suara di tingkat nasional. Partai NU berada di posisi kedua, tertinggal jauh dengan persentase suara 18,4%. Tetapi perolehan suara Partai NU di Jawa Timur tidak terpaut jauh dari Golkar. Persentasenya, NU mendapat suara 35,1% dan Golkar 54,9%.¹⁰ Suatu bukti bahwa NU masih merupakan pilihan politik bagi kebanyakan muslim perdesaan, khususnya di Jawa Timur.

Wacana untuk merampingkan jumlah partai mulai dibicarakan dalam DPR setelah pemilu tahun 1971. Hal itu dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik. NU akhirnya bergabung dengan kelompok partai Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU mempunyai peran yang cukup besar dalam kepengurusan partai tersebut. Jabatan Dewan Syuro diisi oleh K.H. Bisri Syansuri, sedangkan Presiden Partai dijabat oleh K.H. Idham Chalid. Secara resmi PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 ketika kelompok Islam sepakat untuk berfusi dalam partai berlambang kabah tersebut.

Langkah pemerintah setelah penyederhanaan jumlah partai adalah membatasi ruang gerak partai politik pada tingkatan paling bawah di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memperbolehkan partai politik mempunyai perwakilan hanya sampai di tingkat kota/kabupaten. Oleh karena kebijakan tersebut, ruang gerak politik NU hanya sampai di tingkat cabang, itupun harus berbagi porsi dengan organisasi Islam lain dalam PPP seperti Parmusi, Perti, dan PSII. Semenjak saat itu aktifitas politik warga NU terbilang tidak semasif dan seintens pada semasa masih menjadi partai.

¹⁰ M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa* (Jakarta: Serambi, 2013), hlm. 282.

Partai Nahdlatul Ulama merupakan partai yang keberadaannya di Ponorogo menguat sejak tahun 1950-an. Partai Nahdlatul Ulama cabang Ponorogo membawahi 20 Majelis Wakil Cabang (MWC) di seluruh wilayah kecamatan di Ponorogo. Pada tingkat desa dan kelurahan, NU mempunyai pengurus Ranting yang menjadi penggerak basis massa NU di perdesaan.¹¹ Kiprah partai NU Cabang Ponorogo tidak hanya sebatas dalam bidang politik praktis melainkan juga bidang sosial kemasyarakatan, terutama pendidikan.

Peran sosial kemasyarakatan warga NU di Kabupaten Ponorogo bisa dilihat dari munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dirintis oleh warga NU. Kiprah dalam bidang sosial pendidikan antara lain, pendirian Madrasah Al Islam di desa Joresan pada tahun 1967 yang dipelopori oleh K.H. Mahfud Hakiem dan pengurus MWCNU Kecamatan Mlarak.¹² Pada tahun 1968, salah seorang tokoh NU Ponorogo yang bernama K.H. Hasyim Soleh juga mendirikan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak di Tonatan. NU Cabang Ponorogo menaungi beberapa pondok pesantren yang menyatakan afiliasinya kepada Nahdlatul Ulama, seperti Pondok Durisawo Nologaten, Pondok Panjang Jenangan, Pondok Darunnaja Jalen Mlarak, dan Pondok Bajang Balong. Pesantren-pesantren ini mempunyai kedekatan kultural dengan NU karena kiai-kiai pendirinya merupakan tokoh yang merintis NU Cabang Ponorogo pada tahun 1930. NU Cabang

¹¹ AD/ART NU Hasil Muktamar Semarang 1979.

¹²K.H. Mahfud Hakim menjadi pelopor berdirinya Madrasah Al Islam Joresan di Kecamatan Mlarak pada tahun 1967. Madrasah tersebut terdiri dari jenjang pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah dengan waktu belajar selama enam tahun. Nurhadi, *Aktualisasi Diri Peserta Didik dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di Pondok Pesantren Al Iman Putra Sukorejo* (Ponorogo: Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), hlm. 56-57.

Ponorogo juga mempunyai lahan garapan dalam bidang sekolah-sekolah umum non-pesantren. Secara formal NU memiliki lembaga pendidikan Ma'arif yang bertugas mengurus sekolah-sekolah umum non-pesantren dengan basis kurikulum campuran (agama dan umum). Sekolah Maarif pertama didirikan sejak tahun 1951 dengan nama Madrasah NU program 6 tahun yang berlokasi di samping Masjid NU Ponorogo.¹³

Kiprah sosial dan politik NU di Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tokoh lokal setempat. Pada akhir tahun 1960-an NU Cabang Ponorogo diisi oleh tokoh-tokoh yang mempunyai kedekatan secara keagamaan maupun kultural dengan masyarakat Ponorogo. Tokoh-tokoh lokal tersebut antara lain K.H. Mudjab Tohir dan Ahmad Tobroni Torejo.¹⁴ Tokoh-tokoh ini menjadi penggerak Partai NU Cabang semasa Orde Lama dengan memanfaatkan kesenian reog untuk mengimbangi kekuatan PKI yang berhasil menggaet dukungan dari mayoritas seniman reog di Ponorogo. Pada masa itu NU menaungi seniman Reog dalam wadah yang bernama Cakra (Cabang Kesenian Reog Agama).¹⁵

Kiprah NU Cabang Ponorogo sebagai organisasi keagamaan dan partai politik tetap berlanjut pasca peristiwa G30S. Partai NU Ponorogo mulai menyesuaikan dengan situasi sosial politik pasca tragedi di tahun 1965-1966

¹³ Diolah dari <http://www.mamaarif1ponorogo.sc.id/sejarah-ma-maarif-1-ponorogo/> pada 11.28 WIB, tanggal 9 April 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Widda Djuhan oleh Krisdianto pada tanggal 18 Januari 2018.

¹⁵ Kesenian Reog dianggap sebagai representasi masyarakat Ponorogo. sehingga pada masa-masa politik aliran, kesenian ini hampir dipakai oleh semua partai dominan. PKI menggalang dukungan lewat Barisan Reog Ponorogo (BRP), dan PNI mendirikan BREN (Barisan Reog Nasional). Murdianto, "Relasi Negara dan Seniman Reog Ponorogo era Orde Lama sampai Orde Baru" diakses dari <http://www.drmurdianto.wordpress.com> tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.49.

tersebut.¹⁶ Pemerintah melarang aktifitas berkesenian reog selama beberapa tahun pasca kejadian 1965-1966.¹⁷ Akhirnya kesenian reog mulai jarang digunakan oleh NU untuk menarik dukungan masyarakat. Tokoh-tokoh partai NU Ponorogo mempelopori pertunjukkan *gajah-gajahan* yakni sebuah kesenian yang lebih bernafaskan Islam sebagai pengganti reog untuk media kampanye menjelang pelaksanaan pemilu 1971.

Partai NU Ponorogo merupakan partai politik non-Golongan Karya terbesar di Ponorogo menjelang pemilu 1971. NU mendapat dukungan penuh dari masyarakat di wilayah basis pondok pesantren, seperti Kecamatan Mlarak, Ponorogo, Jenangan, Babadan, Siman, serta Jetis. Selain itu, aktifitas badan otonom di tingkat pedesaan turut serta menyumbang dukungan untuk NU, seperti IPNU-IPPNU, Pertanu, Muslimat, dan Pemuda Ansor.

Aktifitas politik partai NU Ponorogo menjelang pemilu 1971 harus berhadapan dengan Golongan Karya yang sedang menggalang kekuatan politik lewat jejaring birokrasi dari pusat sampai aparat desa. Di desa-desa terjadi hasutan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Golongan Karya terhadap warga NU. Selain itu banyak tokoh NU yang mengalihkan dukungannya kepada Golongan Karya sebagai imbas *golkarisasi* pegawai negeri sipil.¹⁸ Ketua Pertanu Cabang Ponorogo, Fatchurrohman, secara resmi mengundurkan diri dari

¹⁶ Pengaruh NU dalam masyarakat Ponorogo tidak bisa lepas dari peran ketokohan kiai dalam memadukan unsur agama dengan budaya Reog. Salah satu tokoh itu adalah K.H. Mudjab Thohir. Wawancara dengan Muhammad Widda Djuhan oleh Krisdianto tanggal 18 Januari 2018.

¹⁷ M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 272.

¹⁸ Wawancara dengan K.H. Anshor Rusdi, pada 17 November 2017.

keanggotaan Partai NU Cabang Ponorogo pada tahun 1971 untuk bergabung dengan Sekretariat Bersama Golongan Karya. Pasca pemilu 1971, beberapa tokoh NU yang disegani oleh masyarakat Ponorogo seperti K.H Mudjab Tohir dan Ahmad Tobroni Torejo juga merapat ke pemerintahan.¹⁹

Aktifitas perpolitikan warga NU di Ponorogo perlahan berkurang semenjak pemilu 1971. Saluran politik yang masih ada lewat Partai Persatuan Pembangunan tidak menarik minat sebagian tokoh lawas NU karena terlanjur bergabung dengan Golongan Karya. Hanya ada beberapa tokoh NU yang vokal dan menjadi representasi NU dalam DPRD dan PPP, di antaranya adalah Ghozali Anwar dan M. Buchori.²⁰ Seiring perkembangan politik di tingkat nasional, serta dinamika dalam tubuh NU membuat kiprah politik warga NU di Ponorogo berkurang secara drastis dan akhirnya memudar. Keluarnya NU dari PPP pada tahun 1984 lewat keputusan Mukhtamar Situbondo semakin mempertegas arah gerak NU kepada organisasi sosial keagamaan yang tidak berpolitik praktis.

1.2 Rumusan Masalah

Nahdlatul Ulama muncul sebagai partai politik terbesar di Ponorogo pada akhir dekade 1960-an. Basis massa NU di Ponorogo terdiri dari kalangan pesantren dan masyarakat muslim di pedesaan. Aktifitas politik warga NU di Ponorogo terbilang signifikan pada akhir dekade 1960-an hingga menjelang

¹⁹ K.H. Mudjab Tohir pernah aktif dalam kepengurusan NU Cabang Ponorogo sebelum akhirnya menjadi pegawai di Departemen Agama dan Kantor KUA. Pada tahun 1982, K.H. Mudjab Tohir menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari fraksi Golkar. Wawancara dengan Muhammad Widda Djuhan oleh Krisdianto, pada tanggal 18 Januari 2018.

²⁰ *Formulir Inventarisasi Cabang Nahdlatul Ulama di Ponorogo tahun 1984.*

pemilu 1971. Tetapi pasca pemilu 1971 mulai terjadi penurunan aktifitas politik praktis dari berbagai elemen NU di Ponorogo. Penelitian ini akan mengkaji mengenai perkembangan partisipasi politik warga NU di Ponorogo selama periode 1969-1982.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di lingkup lokal Ponorogo. Fokus yang akan dituju adalah seluruh elemen Nahdlatul Ulama diantaranya, kiai dan santri, pengurus, anggota dan warga NU di Ponorogo. Penelitian ini berfokus pada rentang tahun 1969-1982. Tahun 1969 dipilih sebagai titik awal penulisan karena warga NU di Ponorogo mulai menata kembali agenda perpolitikan partai dalam menyongsong agenda pemilihan umum terdekat. Seluruh elemen partai berusaha untuk digiatkan kembali melalui konsolidasi dan rapat umum di tingkat MWCNU untuk menyongsong Pemilu yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1971. Batasan akhir penelitian ini adalah tahun 1982 ketika NU berkiprah dalam pemilihan umum melalui Partai Persatuan Pembangunan untuk terakhir kalinya. Kiprah politik NU dalam PPP juga hanya diwakili oleh segelintir tokoh NU yang masih aktif di PPP.²¹ Oleh karena itu, partisipasi politik warga NU secara formal telah berakhir semenjak pemilihan umum pada tahun 1982 tersebut.

Penelitian ini dapat dikategorisasikan ke dalam sejarah sosial-politik karena mengkaji mengenai partisipasi politik dari suatu komunitas masyarakat yang

²¹ *Formulir Inventarisasi Nahdlatul Ulama Cabang Ponorogo tahun 1984.*

mempunyai identitas dan kultur yang sama.²² Ikatan primordial dalam komunitas warga NU di Ponorogo memungkinkan mereka tampil sebagai salah satu kekuatan sosial-politik yang layak untuk diteliti. Ruang lingkup pembahasan yang terjadi di wilayah lokal, tidak menjadikan kajian ini menjadi sejarah lokal. Hal itu dikarenakan narasi-narasi yang terjadi masih dipengaruhi oleh narasi dari tingkatan yang lebih tinggi yakni keadaan perpolitikan di tingkat nasional.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

NU beserta basis massanya masih menjadi aktor di dalam format perpolitikan negara, semenjak akhir dekade 1960-an hingga awal 1980-an, baik ketika masih menjadi partai maupun setelah menjadi unsur dari PPP. Selama periode tersebut warga NU di berbagai daerah mengalami marjinalisasi di segenap bidang sosial-politik, di antaranya intimidasi, golkarisasi, hingga depolitisasi. Warga NU di Kabupaten Ponorogo berusaha tetap eksis dalam kiprah sosial dan politiknya sekalipun mengalami marjinalisasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji partisipasi politik dari warga NU di Ponorogo selama rentang tahun 1969-1982.

Elemen di dalam NU kemudian menyadari akan marjinalisasi warga NU di sektor sosial dan politik tersebut. Sehingga pada awal dekade 1980-an muncul desakan dari dalam internal NU untuk membawa organisasi tersebut keluar dari kebuntuan politik Orde Baru dan mengakhiri marjinalisasi warga NU di segenap sektor sosial dan politik. Keputusan untuk keluar dari politik praktis tercetus

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 41.

dalam Mukhtar NU di Situbondo tahun 1984, ketika NU secara bulat memutuskan untuk mulai menggarap aspek sosial umat Islam sehingga dapat relevan dengan perkembangan zaman.²³ Oleh karena itu penelitian tentang aspek politik dari warga NU pra-Mukhtar Situbondo ini dapat menjadi kerangka historis yang menjadi latar belakang transformasi NU menjadi *civil society* pada dekade 1980-an.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasari oleh periodisasi sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama yang digagas oleh Choril Anam dalam buku *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Buku ini mengkaji perkembangan NU sejak berdirinya hingga beberapa tahun pasca pemulihan khittah. Penelitian Anam berfokus pada kiprah Nahdlatul Ulama di tingkat nasional.²⁴ Dalam buku tersebut perkembangan kiprah politik NU pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sampai tahun 1973. Sedangkan kajian yang dilakukan penulis berfokus pada kiprah politik NU di tingkat lokal dan mengambil batasan temporal dari tahun 1969-1982. Terdapat kesulitan untuk mencari relevansi narasi besar NU di tingkat nasional dengan keadaan NU di daerah-daerah. Sebab dinamika yang terjadi di tataran daerah berkembang lebih lambat daripada dinamika di tingkat pusat,

²³ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 10.

²⁴ Buku ini menjadi bacaan wajib bagi para pengkaji sejarah NU. Di dalamnya tidak hanya berisi perjalanan kiprah sosial dan politik NU, tapi juga mengkaji nilai-nilai yang menjadi pegangan para ulama dan warga NU dalam kehidupan bermasyarakat yaitu nilai-nilai Islam ala *Ahlussunnah wal Jamaah*. Choril Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Solo: Jatayu, 1985), hlm. 4-5.

ataupun sebaliknya. Penulis mengambil titik tolak setahun lebih lambat dari periodisasi yang digagas oleh Anam, sebab aktifitas politik warga NU di Kabupaten Ponorogo secara efektif baru dimulai pada tahun 1969, ketika masa-masa persiapan pemilihan umum tahun 1971. Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada partisipasi politik warga NU di Kabupaten Ponorogo pada masa sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan umum 1971.

Keadaan umat Islam pada awal era kekuasaan Soeharto menarik minat sarjana dan akademisi untuk mengkajinya. Pendekatan secara sosiologis terhadap dinamika umat Islam pada awal kekuasaan Soeharto dilakukan oleh Abdul Munir Mulkhan dalam buku yang berjudul *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*. Buku ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintahan Orde Baru tetap memperhatikan perkembangan umat Islam di Indonesia, terutama terkait kepentingan politik dan sosialnya. Umat Muslim selalu mempunyai kecenderungan untuk mendasarkan setiap aspek kehidupan sosial dengan tata nilai Islam. Dalam artian selalu ada potensi dalam umat Muslim di Indonesia untuk merubah haluan dan kebijakan-kebijakan negara menjadi bercorak Islam. Hal itu menyebabkan terjadinya gesekan umat Islam dengan negara yang notabene memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas dan keutuhan nasional.²⁵ Perbedaan ideologi antara negara dan umat Islam ini, menurut Mulkhan, akan terus berpotensi melahirkan konflik-konflik yang berkelanjutan.

Mulkhan mencatat bahwa telah terjadi pergeseran pandangan dan cita-cita umat Muslim. Pergeseran ini disebabkan oleh penyempitan ruang gerak dan

²⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987* (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 8

saluran politik pada masa Orde Baru.²⁶ Hal serupa dirasakan oleh berbagai kelompok Islam tidak terkecuali NU. Organisasi ini masih merasakan ‘manisnya’ kancan politik semasa Pemilu tahun 1971, sebelum akhirnya berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Ketika berada dalam naungan PPP inilah NU kemudian mulai memikirkan kembali aspek sosial umat yang sebelumnya pernah dikesampingkan.

Kajian tentang perubahan orientasi politik NU pada dekade 1980-an menarik minat sarjana untuk mengkaji dari sudut pandang ilmu politik. Salah satu penelitiannya adalah Abdul Gaffar Karim dari Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM yang menulis skripsi berjudul *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Penelitian ini mengkaji tentang situasi dalam tubuh NU dan hubungannya dengan pemerintah pada tahun-tahun menjelang kembali ke Khittah 1926 di tahun 1984. Poin terpenting dari penelitian Karim adalah implementasi keputusan tersebut dalam setiap aktifitas sosial dan politik NU.²⁷

Karim menjelaskan bahwa keputusan Mukhtar Situbondo menjadi titik awal NU dalam melakukan orientasi ulang kiprahnya dalam bidang sosial dan politik. Dalam upayanya untuk melakukan reorientasi gerakan, diasumsikan terdapat disorientasi dalam tubuh organisasi NU sebelum kembali ke khittah 1926. Karim mencermati dari kajian lain bahwa NU pada masa itu sudah terlibat terlampau jauh dalam politik praktis sehingga melupakan agenda pemberdayaan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁷ A. Gaffar Karim, *Op. cit.*, hlm. 194-195.

umat.²⁸ Basis massa NU hanya ‘dimanfaatkan’ sebagai konstituen PPP untuk meraup dukungan kepada wakil-wakil yang nanti akan berkiprah di parlemen. Penelitian inilah yang akan menjelaskan dinamika kiprah NU sebagai organisasi sosial keagamaan sekaligus aktor politik di tingkat daerah sebelum tahun 1984 tersebut.

Kajian mengenai perpolitikan NU di tingkat lokal sebelum Keputusan Situbondo telah banyak dilakukan oleh para sarjana sejarah di Indonesia. Salah satunya adalah karya skripsi berjudul *Tantangan Partai NU Cabang Surabaya Menghadapi Pemilu 1971*, yang ditulis oleh Fathu Shodiqur Rohman dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Penelitian ini mengkaji mengenai tantangan internal maupun eksternal partai NU Cabang Surabaya dalam menjelang pemilu 1971. Penelitian ini menjelaskan bahwa telah terjadi perebutan basis massa NU oleh kelompok Golongan Karya melalui berbagai peraturan pemilu, intimidasi, pembentukan kelompok ulama tandingan, hingga kebijakan monoloyalitas.²⁹

Penelitian oleh Fathu Shodiqur Rohman ini memiliki kesamaan dengan tema dan kajian penulis yakni berkisar pada kiprah politik NU di tataran daerah menjelang Pemilu 1971. Perbedaannya terletak pada aspek spasial, di mana penelitian tersebut mengkaji NU di lingkup Kota Surabaya sedangkan penulis mengkaji di lingkup Kabupaten Ponorogo. Perbedaan lainnya terletak pada aspek sosial yang menjadi fokus penulis dalam mengkaji perpolitikan NU di tingkat

²⁸ Einar M Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 209. dalam A. Gaffar Karim, *Op. cit.*, hlm. 12

²⁹ Fathu Shodiqur Rohman, *Tantangan Partai NU Cabang Surabaya Menghadapi Pemilu 1971* (Surabaya: Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2017), hlm. 99.

lokal. Penulis tidak hanya melihat aspek perpolitikan NU dari sudut pandang pengurus partai melainkan juga dari warga NU yang turut berpartisipasi mendukung NU dalam pemilu terakhir yang diikuti oleh partai NU tersebut.

Penelitian lain yang terkait NU lokal dalam format perpolitikan Orde Baru juga ditulis oleh M. Ali Haidar dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul *Dukungan Suara NU dalam Kemenangan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1977-1982 di Kabupaten Gresik*. Haidar mengungkapkan bahwa kemenangan PPP dalam Pemilu tahun 1977 dan 1982 tidak disangka-sangka oleh golongan karya dan partai lain. NU mempunyai peran besar dalam kemenangan PPP dikarenakan kuantitas basis massa kalangan Nahdliyin cukup besar di Kabupaten Gresik.³⁰

Haidar menyimpulkan bahwa peran kiai sebagai motor politik menjadi faktor penentu kemenangan PPP. Identitas sebagai satu-satunya partai politik Islam menjadi faktor yang memudahkan para kiai untuk mengarahkan pilihan politik warga NU kepada PPP. Tidak hanya sampai di situ, para kiai juga bertindak secara langsung sebagai juru kampanye di lapangan untuk turut meyakinkan publik secara langsung agar memilih PPP. Identitas keislaman yang melekat kuat dalam partai PPP membuat sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab, menuduh para mereka yang berada di luar PPP adalah kafir. Hal ini memicu Ali Murtopo menandakan bahwa Golkar merupakan pemain utama

³⁰ M. Ali Haidar, *Dukungan Suara NU dalam Kemenangan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1977-1982 di Kabupaten Gresik*, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No. 2 Juni 2014, hlm. 4.

dalam demokrasi di Indonesia, sehingga bebas ‘menghalalkan segala cara’ untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Penelitian dari Haidar ini memfokuskan kajian pada peristiwa-peristiwa di sekitar Pemilu tahun 1977-1982. Ada yang terlupa dari Haidar, yaitu kajiannya agak melupakan proses-proses politik NU dalam PPP yang telah bermula sejak awal tahun 1970-an.³¹ Juga hal yang terpenting adalah penarikan diri segala unsur NU dari PPP yang mulai santer terdengar tidak lama setelah pemilu tahun 1982. Proses-proses politik seperti komunikasi politik, hubungan dengan unsur Islam lain, ijtihad kiai, dan strategi-strategi dakwah tertentu bisa menjadi indikator dalam menilai perkembangan politik NU. Pemilu hanya salah satu cara untuk melihat perkembangan kiprah perpolitikan NU di daerah. Maka penulis akan melihat faktor-faktor non-politis guna menjelaskan perkembangan perpolitikan NU di Ponorogo, terutama aspek sosial dari warga NU semasa masih menjadi kekuatan politik.

Keputusan Mukhtamar Situbondo mempunyai konsekuensi terhadap perpolitikan NU di tingkat lokal. Ali Siswanto mencatat bahwa aktifitas-aktifitas sosial keagamaan kembali menggeliat dalam tubuh organisasi NU di Gresik pasca keputusan Kembali ke Khittah tersebut.. Ali Siswanto mencatat bahwa basis massa Nahdliyin pada periode sebelum keputusan Situbondo hanya

³¹ Pada tanggal 13 Maret 1970 telah terbentuk *Kelompok Persatuan Pembangunan*, yakni gabungan partai-partai yang dengan basis ideologi spiritual-materialis di dalam rapat-rapat legislasi DPR-GR. Di dalamnya ada antara lain NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Ini merupakan suatu percobaan untuk menyederhanakan pendapat-pendapat di parlemen, Tapi penyederhanaan partai benar-benar terjadi sejak tahun 1973. Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 56-57.

‘dimanfaatkan’ untuk kepentingan politik elit di tingkat lokal dan nasional.³² Hal yang menguatkan itu adalah terbengkalainya kegiatan-kegiatan kultural keagamaan NU di daerah karena minimnya penyaluran aspirasi, meskipun warga NU cukup mempunyai wakil-wakil yang duduk di parlemen.

Implementasi dari keputusan Situbondo terhadap perpolitikan NU di tingkat lokal adalah dengan pelarangan pengurus NU menjadi anggota partai politik manapun. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya rangkap jabatan yang menyebabkan menurunnya efektifitas pengabdian dari pengurus NU yang pernah menyebabkan terbengkalainya beragam aktifitas kultural keagamaan. Poin terpenting dari penelitian yang dilakukan oleh Ali adalah mulai meningkatnya aktifitas dan program-program PCNU Gresik setahun setelah keputusan kembali ke khittah.³³ Berbagai program NU yang awalnya tidak terlaksana karena berbenturan dengan agenda PPP akhirnya mulai digiatkan kembali.

Penelitian ini akan menjadi pelengkap sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait dinamika organisasi NU di tingkat daerah dari tahun 1969 sampai 1982. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengurus ataupun tokoh NU melainkan warga NU yang berada di desa sebagai penyokong utama organisasi. Penelitian ini membedakan diri dengan penelitian lain karena penulis berusaha melihat aspek perpolitikan NU dari sudut pandang warga NU di desa-desa. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad Baso terkait NU-

³² Ali Siswanto, *NU Cabang Gresik: Sikap Terhadap Makna Khittah NU 1926 tahun 1981-1984* (Surabaya: Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2007), hlm. 33.

³³ *Ibid.*, hlm. 63.

Studies bahwa NU harus ‘menulis dirinya sendiri’, sebab sebelumnya NU hanya berposisi sebagai obyek yang ditulis dan dijelaskan melalui sudut pandang akademisi seperti Mitsuo Nakamura dan Greg Fealy lewat terminologi-terminologi Barat.³⁴ Pergeseran perspektif kajian tentang NU ini harus dimasukkan ke dalam metode penelitian sejarah agar unsur-unsur di dalam NU di tingkat lokal dapat berbicara ‘atas nama dirinya sendiri’, karena motivasi suatu kelompok dalam berpolitik terkait erat dengan aspek lokalitas yang tidak bisa diseragamkan.

1.6 Kerangka Teori

NU berperan dalam proses transisi kekuasaan dari presiden Soekarno ke Soeharto. Sebuah peran yang menjadikan NU muncul sebagai kekuatan politik sipil yang masih bisa diperhitungkan pasca kejatuhan Soekarno.³⁵ Struktur organisasi NU yang hierarkis serta kuatnya otoritas moral dari ulama, telah mempermudah partai ini dalam koordinasi massa, sementara di sisi lain banyak partai politik harus kehilangan kekuataannya tak lama setelah Soeharto naik ke tampuk kepemimpinan.

Agenda utama pada awal pemerintahan Soeharto adalah stabilisasi politik di tingkat nasional maupun lokal. Stabilisasi ini merupakan reaksi atas banyaknya kekisruhan politik yang terjadi pada era sebelumnya. Maka pemerintahan

³⁴Ahmad Baso, *op. cit.*, hlm. 5-6.

³⁵ Andree Feillard, *NU vis a vis Negara, Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 87.

Soeharto memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai tahun 1971.³⁶ Termasuk dalam agenda stabilisasi politik itu adalah pembentukan Golongan Karya sebagai *vis a vis* partai politik yang di dalamnya berisi kalangan militer, pegawai negeri, teknokrat, dan kelompok-kelompok yang anti-komunis. Golongan Karya boleh jadi merupakan representasi politik tidak langsung dari pemerintah yang berkuasa.

Hal tersebut bisa dilihat pada saat Departemen Dalam Negeri menyerukan monoloyalitas kepada pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintah. Prinsip monoloyalitas mengharuskan semua pegawai negeri untuk menjadi pemilih dan pendukung Golongan Karya dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1971.³⁷ Kebijakan ini telah membuat banyak organisasi politik kehilangan kader-kader potensial yang tidak punya pilihan lain kecuali ‘menyeberang’ ke Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Selain itu, basis massa partai politik secara perlahan juga mulai terpecah-pecah, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama.

Sistem politik pada awal 1970-an terus mengalami perubahan, yang terpenting adalah dilakukannya penyederhanaan partai politik yang dikelompokkan berdasarkan ideologinya. NU masuk ke dalam Partai Persatuan

³⁶ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hlm. 96.

³⁷ Pada tahun 1971, Departemen Agama yang dipegang dari kalangan NU menolak untuk menerapkan peraturan monoloyalitas, yang merupakan semacam “kewajiban moral” bagi tiap pegawai negeri untuk menjadi anggota dan memilih Golongan Karya. Andree Feillard, “Islam Tradisional dan Tentara dalam Era Orde Baru”, dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 55.

Pembangunan bersama organisasi Islam seperti Perti, MI, dan PSII.³⁸ Dengan masuknya NU ke dalam PPP, kekuatan politik NU terus melemah. Faktor penyebabnya selain prinsip monoloyalitas pegawai departemen pada Golkar, adalah dilarangnya partai politik untuk mempunyai perwakilan di bawah tingkat kabupaten/kota. Dalam ranah ilmu politik, kebijakan ini sering disebut sebagai depolitisasi massa yang berarti suatu usaha dari pihak yang berkuasa untuk mengurangi atau menghilangkan kegiatan politik sebuah masyarakat demi menciptakan stabilitas politik.³⁹ Hal tersebut secara tidak langsung menghambat penyaluran aspirasi politik warga Nahdliyin. Selain itu banyak agenda dan dakwah NU di tingkat cabang terbengkalai, karena para ulama hanya berperan sebagai peraup suara partai politik.⁴⁰

Nahdlatul Ulama menjadi partai dengan basis massa terbesar di Kabupaten Ponorogo setelah tahun 1965. NU disokong oleh basis massa pesantren sekaligus terdapat kedekatan antara ulama NU dengan kalangan seniman reog. Kedekatan NU dengan tokoh warok menambah pengaruh NU, karena mereka cukup dihormati dalam kehidupan masyarakat Ponorogo. Beberapa tokoh warok yang mempunyai ikatan dengan NU Cabang Ponorogo antara lain Ahmad Tobroni Torejo dan K.H. Mudjab Thohir. Partisipasi politik NU di Ponorogo tidak hanya dilakukan oleh elit dan tokohnya, melainkan juga oleh warga NU yang tersebar di banyak kecamatan di Ponorogo.

³⁸ Kacung Marijan, *op. cit.*, hlm. 105-106.

³⁹ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 215-216.

⁴⁰ Ali Siswanto, *op. cit.*, hlm. 78.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.⁴¹ Bentuk partisipasi politik tersebut antara lain dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, serta mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Partisipasi politik warga NU melalui Partai NU Cabang Ponorogo cukup masif pada tahun-tahun sebelum Pemilu 1971. Partisipasi politik menjelang tahun 1971 tersebut menyebabkan warga NU harus berhadapan dengan intimidasi sekaligus hasutan yang dilakukan oleh oknum Golkar. Tetapi semenjak pemilu tersebut, diasumsikan terdapat penurunan partisipasi politik oleh warga NU di Ponorogo.

Penurunan partisipasi politik warga NU terlihat dari penurunan aktifitas politik praktis oleh warga NU seperti kampanye, rapat politik, dan dukungan kepada elit dan tokoh NU yang duduk dalam parlemen.⁴² Penurunan partisipasi politik warga NU di Ponorogo pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an diasumsikan berbanding terbalik dengan aktifitas dalam bidang sosial dan keagamaan. NU yang pada awalnya berposisi sebagai kekuatan politik praktis secara perlahan menggarap kembali aspek sosial pada awal dekade 1980-an. Menurut Abdul Munir Mul Khan hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 1.

⁴² McClosky mengatakan bahwa menurunnya partisipasi politik diawali dari sikap apatis karena sikap acuh tak acuh, tidak tertarik dan tidak paham masalah politik, serta tidak yakin bahwa usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil. *ibid.*, hlm. 4.

persepsi di dalam ikatan primordial komunitas keagamaan dalam merespon situasi sosial dan politik pada era Orde Baru.⁴³ Orientasi baru warga NU tersebut menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penurunan partisipasi politik warga NU dalam konteksnya di Ponorogo.

1.7 Metode dan Sumber Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian terbagi ke dalam beberapa tahap, di antaranya; Pemilihan Topik, Membuat Rancangan Penelitian, Pengumpulan Sumber dan Data (Heuristik), Kritik Sumber (Verifikasi), Interpretasi, dan Penulisan Sejarah (Historiografi).⁴⁴ Pada proses kedua yakni Membuat Rancangan Penelitian, penulis sudah melakukan observasi berupa wawancara dengan beberapa tokoh NU di Kabupaten Ponorogo. Observasi awal juga dilakukan dengan menggali sumber tertulis berupa koran sezaman yang diterbitkan oleh *Surabaya Post*. Sebagai koran lokal Jawa Timur, banyak peristiwa di seputar komunitas NU terekam dalam koran tersebut.

Tahap ketiga: Pengumpulan Sumber Sejarah, pada tahap ini yang telah penulis lakukan adalah dengan mencari sumber primer berupa dokumen yang disimpan di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo. Meskipun jauh dari kata layak, dokumen sejarah terkait NU Cabang Ponorogo masih tersimpan di rapi sejak tahun 1960-an. Selain itu, penulis juga telah dan berencana mewawancarai tokoh-tokoh NU, kiai-kiai pengasuh pondok pesantren,

⁴³ Abdul Munir Mul Khan, *op. cit.*, hlm. 20-21.

⁴⁴ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 31.

serta kader NU yang aktif pada periode 1969-1982 di Ponorogo. Sumber-sumber lainnya digali lewat penerbitan atau produk pers sezaman. Sejauh ini koran-koran lokal seperti *Surabaya Post* dan *Harian Umum* bisa ditambahkan untuk melengkapi perbendaharaan sumber. Harian yang dikelola oleh NU, *Duta Masyarakat*, juga bisa menjadi pertimbangan untuk menambah koleksi sumber kedua (sekunder). Penulis berusaha menggali sumber data terkait daerah Ponorogo tahun 1969-1982 dari Perpustakaan Bappeda Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung, serta Arsip Daerah Jawa Timur.

Langkah selanjutnya, Interpretasi. Pada langkah ini penulis akan mengabstraksikan data dan temuan fakta-fakta menggunakan beberapa konsep untuk menjelaskan suatu fenomena sejarah. Konsep pertama yang digunakan adalah partisipasi politik. Istilah tersebut akan menjadi garis besar pembahasan pada penelitian ini, yakni melihat perkembangan partisipasi politik warga NU di Ponorogo sepanjang periode 1969-1982.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah Historiografi atau penulisan Sejarah. Seperti kebanyakan penelitian lain, langkah ini akan berjalan lancar apabila ada ketekunan dari penulisnya. Untuk itu, perlu kiranya penulis harus sesering mungkin mendiskusikan topic penelitian ini dengan dosen pembimbing, Dr. Samidi, serta beberapa akademisi dan sejarawan lokal di Ponorogo, seperti Dawam Multazam (Staf Pengajar Insuri Ponorogo) dan saudara Krisdianto (Alumnus Pendidikan Sejarah UNY).

1.8 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam menelaah penelitian ini, maka perlu untuk membagi pembahasan ke dalam beberapa bab dan sub bab. Penelitian ini terdiri dari empat (I-IV) bab, dengan perincian sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah yang muncul dari topik penelitian. Pada bab ini juga terdapat ruang lingkup spasial dan temporal, kerangka teori yang dipakai, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kiprah dan Perkembangan NU di Ponorogo tahun 1926-1960 an. Pada sub bab pertama membahas mengenai karakteristik sosial-budaya masyarakat Ponorogo serta eksistensi kaum santri di Ponorogo yang menjadi embrio berkembangnya NU di daerah tersebut. Sub bab kedua berisi latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama, peran sosial keagamaan yang telah dilakukan NU sejak tahun 1926 sampai tahun 1952, serta kiprah Nahdlatul Ulama dalam bidang politik tahun 1952-1968.

Bab III Perkembangan Kiprah Politik Warga NU di Kabupaten Ponorogo, akan dibagi menjadi beberapa sub bab seperti Perebutan Pengaruh dalam Politik Desa, Perebutan Basis Massa, Kontestasi Partai dalam Pemilu 1971, Golkarisasi Anggota dan Tokoh NU, Partisipasi Setengah Hati NU dalam PPP, serta Orientasi Baru Warga NU dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan.

Bab IV Merupakan elaborasi atas fakta-fakta yang telah tersusun pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berusaha menyimpulkan perkembangan partisipasi

politik dan polarisasi warga NU di Ponorogo seiring perubahan situasi perpolitikan di tingkat lokal maupun nasional.